

**ANALISIS PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN WISATA  
PERMANDIAN ALAM LEWAJA DI KABUPATEN ENREKANG**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Untuk Mencapai Derajat Sarjana S-1  
Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**Oleh**

**RISWANDA IMAWAN**

**E121 16 502**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**LEMBARAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**ANALISIS PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN WISATA  
PERMANDIAN ALAM LEWAJA DI KABUPATEN ENREKANG**

Dipersiapkan dan disusun oleh

**RISWANDA IMAWAN**  
**E121 16 502**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi  
Pada tanggal 25 November 2021  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si  
NIP. 19570707 198403 1 005

  
Dr. A. Lukman Iwan, S.IP., M.Si  
NIP. 19790106 200501 1 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin

  
Dr. H.A.M. Rusli, M.Si.  
NIP. 19640727 1991 03 1 001

LEMBARAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**ANALISIS PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN WISATA  
PERMANDIAN ALAM LEWAJA DI KABUPATEN ENREKANG**

Dipersiapkan dan disusun oleh

**RISWANDA IMAWAN**  
E121 16 502

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian  
Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

**Makassar, pada hari Kamis, 25 November 2021**

Menyetujui:

**PANITIAN UJIAN**

Ketua : Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si

Sekretaris : Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si

Anggota : Dr. Indar Arifin, M.Si

Anggota : Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si

Pembimbing II : Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si

(*Rasyid Thaha*)  
(*Lukman Irwan*)  
(*Indar Arifin*)  
(*Suhardiman Syamsu*)  
(*Rasyid Thaha*)  
(*Lukman Irwan*)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Riswanda Imawan  
NIM : E12116502  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

### **ANALISIS PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN WISATA PERMANDIAN ALAM LEWAJA DI KABUPATEN ENREKANG**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 25 Januari 2022

Yang Menyatakan



RISWANDA IMAWA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Al-hamdulillahi rabbil 'alamin, puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya berupa kehidupan, ilmu, rizki, kekuatan dan kesehatan yang diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang membantu perjuangan beliau dalam menegakkan agama Islam di muka bumi ini, serta kaum muslimin dan muslimat yang masih konsisten menjalankan sunnah-Nya, semoga kita semua orang-orang yang termasuk didalamnya, Aamiin. Adapun judul skripsi yang telah diselesaikan oleh penulis berjudul **“ANALISIS PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN WISATA PERMANDIAN ALAM LEWAJA DI KABUPATEN ENREKANG”**, skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh gelar sarjana pendidikan (S1) pada program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini bukanlah suatu hal yang mudah dan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menemukan berbagai kendala dan tantangan. Namun kendala dan tantangan tersebut dapat teratasi berkat

usaha keras, tekad yang kuat dan tentunya berkat dukungan tenaga, pikiran dan doa dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini, izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta, Pak Rafiuddin dan Bu Dasmati yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik penulis. Terima kasih telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga serta memberikan segala bentuk dukungan yang luar biasa kepada penulis dalam setiap proses penyelesaian skripsi ini, baik itu dukungan moral, materi dan doa yang tiada hentinya selalu diberikan dengan ikhlas kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu melindungi, memberikan kesehatan, rezeki yang baik dan keselamatan dunia akhirat kepada kedua orang tua penulis.

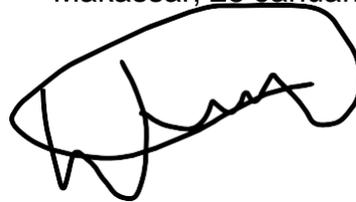
Terimakasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada;

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Armin Arsyad, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh stafnya.
3. Dr. H. M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan beserta seluruh stafnya.
4. Kepada kedua pembimbing penulis, Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si Sebagai Pembimbing I Dan Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si Sebagai Pembimbing II, yang senantiasa meluangkan waktunya,

memberikan motivasi dan memberikan literatur-literatur serta diskusi yang dilakukan dengan penulis.

5. Kepada saudara dan saudari seperjuangan VEREN16EN/Angkatan 2016 Ilmu Pemerintahan, terimakasih atas segalanya, semoga Allah SWT, tetap menjaga persahabatan kita, Aamiin.

Makassar, 25 Januari 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, enclosed within a large, irregular oval shape.

Riswanda Imawan

## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iii
LEMBAR .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	ix
INTISARI.....	xii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Konsep Implementasi.....	9

2.2 Pemerintah Daerah (Dinas Pariwisata.....	19
2.2.1 Pemerintah Daerah .....	19
1.2.2 Dinas Pariwisata .....	21
2.3 Tinjauan Tentang Pengelolaan.....	22
2.4 Objek Wisata .....	23
2.5 Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Enrekang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2017-2028 .....	33
2.6 Kerangka Fikir .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>
3.1 Metode Penelitian .....	43
3.2 Tipe Penelitian .....	45
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	46
3.4 Informan .....	46
3.5 Teknik pengumpulan data .....	47
3.6 Jenis Data .....	47
3.7 Fokus Penelitian.....	48
3.8 Analisis Data .....	49
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
4.1 Gambar Umum Kabupaten Enrekang .....	51
4.1.1 Keadaan Geografis Kabupaten Enrekang .....	52
4.1.2 Luas Wilayah .....	53
4.1.3 Topografi .....	54

4.1.4	Kependudukan .....	58
4.2	Gambaran Khusus Lokasi Penelitian.....	59
4.3	Visi & Misi Kabupaten Enrekang .....	60
4.3.1	Visi.....	61
4.3.2	Misi .....	63
4.4	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang .....	64
4.4.1	Visi & Misi, Tujuan, Sasaran.....	63
4.4.2	Tugas Pokok dan Fungsi .....	64
4.4.3	Struktur Organisasi Dinas.....	69
4.5	Objek Wisata Alam Lewaja Kabupaten Enrekang.....	70
4.5.1	Sejarah Berdirinya Wisata Alam Lewaja.....	70
4.5.2	Deskripsi Objek Wisata Alam Lewaja .....	72
4.6	Pengelolaan Wisata Permandian Alam Lewaja, Kabupaten Enrekang.....	73
4.6.1	<i>Communication</i> (Komunikasi).....	74
4.6.2	<i>Resourches</i> (Sumber Daya) .....	80
4.6.3	<i>Dispositions or attitudes</i> (Sikap Pelaksana).....	84
4.6.4	<i>Bureaucratic Structure</i> (Struktur Birokrasi) .....	88
4.7	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Objek Wisata Alam Lewaja.....	92
4.7.1	Faktor Pendukung .....	92
4.7.2	Faktor Penghambat .....	100
BAB V	PENUTUP .....	110
5.1	Kesimpulan .....	110

5.2 Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA.....	114
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	109

### DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang Tahun 2010.....	53
Tabel 2. Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang Tahun 2010.....	58
Tabel 3. Analisis; <i>Communication</i> (Komunikasi) .....	78
Tabel 4. Pendapatan Wisata Alam Lewaja.....	83
Tabel 5. Analisis; <i>Resourches</i> (Sumber Daya).....	83
Tabel 6. Pembangunan Wisata Lewaja tahun 2019 .....	87
Tabel 7. Analisis Dispositions or attitudes (Sikap Pelaksana) .....	87
Tabel 8. Daftar Nama Pengelola Objek Wisata Permandian Lewaja Tahun 2021 .....	90
Tabel 9. Analisis; <i>Bureaucratic Structure</i> (Struktur Birokrasi).....	91
Tabel 10. Analisis Faktor Pendukung; <i>Communication</i> (Komunikasi) .....	93
Tabel 11. Analisis Faktor Pendukung; <i>Resourches</i> (Sumber Daya).....	95
Tabel 12. Analisis Faktor Pendukung; <i>Dispositions or attitudes</i> (Sikap Pelaksana).....	97
Tabel 13. Analisis Faktor Pendukung; <i>Bureaucratic Structure</i> (Struktur Birokrasi).....	99
Tabel 14. Analisis Faktor Penghambat; <i>Communication</i> (Komunikasi) .....	102

Tabel 15. Analisis Faktor Penghambat; <i>Resourches</i> (Sumber Daya) .....	104
Tabel 16. Analisis Faktor Penghambat; <i>Dispositions or attitudes</i> (Sikap Pelaksana).....	106
Tabel 17. Analisis Faktor Penghambat; <i>Bureaucratic Structure</i> (Struktur Birokrasi).....	109

### DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Kabupaten Enrekang .....	52
Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas .....	69

## INTISARI

**Riswanda Imawan, E12116502. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Menyusun Skripsi Dengan Judul “Analisis Pemerintah Dalam Pengelolaan Wisata Permandian Alam Lewaja Di Kabupaten Enrekang”. Dibawah Bimbingan Oleh Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si Sebagai Pembimbing I Dan Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si Sebagai Pembimbing II.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Wisata Permandian Alam Lewaja di Kabupaten Enrekang. Peraturan terkait pariwisata di Kabupaten Enrekang tertuang dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Enrekang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2017-2028.

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan dan bermaksud menjelaskan mengenai bagaimana implementasi kebijakan Kabupaten Enrekang terhadap pengelolaan Wisata Alam Lewaja. Teknik Pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumentasi.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang berupa pembangunan, renovasi serta publikasi. Faktor pendukung dalam pengelolaan Wisata Alam Lewaja seperti adanya peraturan yang jelas pengelolaan wisata di Kabupaten Enrekang Nomor (Perda Kabupaten Enrekang Nomor 8 Tahun 2017) dan adanya struktur yang jelas terkait pengelola Wisata Alam Lewaja. Sedangkan faktor penghambat dalam pengelolaan Wisata Alam Lewaja seperti latar belakang pendidikan pengelola Wisata Alam Lewaja, pelatihan untuk pengelola Wisata Alam Lewaja belum ada dan adanya pengelola yang tidak aktif.

**Kata Kunci; Kebijakan, Pengelolaan, Wisata Permandian Alam Lewaja**

## **ABSTRACT**

***Riswanda Imawan, E12116502. Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, on a Thesis entitled "Government Analysis in the Management of Lewaja Natural Baths in Enrekang Regency". Under the Guidance By Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si As Advisor I And Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si as Advisor II.***

*This study aims to determine the management of Lewaja Natural Baths Tourism in Enrekang Regency. Regulations related to tourism in Enrekang Regency are contained in the Regional Regulation (PERDA) of Enrekang Regency Number 8 of 2017 concerning the Master Plan for Regional Tourism Development of Enrekang Regency for 2017-2028.*

*The type of research used is descriptive qualitative, which is a study that aims to describe and intends to explain how the implementation of Enrekang Regency policies on the management of Lewaja Nature Tourism. Data collection techniques used are observation, interviews, library research and documentation studies.*

*The results of the study indicate that the management carried out by the Enrekang Regency Government is in the form of construction, renovation and publication. Supporting factors in the management of Lewaja Nature Tourism such as the existence of clear regulations for tourism management in Enrekang Regency Number (Enrekang Regency Regulation Number 8 of 2017) and the existence of a clear structure related to the management of Lewaja Nature Tourism. While the inhibiting factors in the management of Lewaja Nature Tourism such as the educational background of Lewaja Nature Tourism managers, training for Lewaja Nature Tourism managers does not yet exist and there are inactive managers.*

***Keywords; Policy, Management, lewaja natural baths tour***

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sektor pariwisata sebagai kegiatan perekonomian telah menjadi andalan potensial dan prioritas pengembangan bagi sejumlah negara, terlebih bagi negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki potensi wilayah yang luas dengan daya tarik wisata yang cukup besar, banyaknya keindahan alam, aneka warisan sejarah budaya, dan kehidupan masyarakat (etnik). Pariwisata di Indonesia merupakan salah satu penunjang perekonomian yang memiliki prospek yang cerah, tetapi hingga dewasa ini belum memperlihatkan peranan yang sesuai dengan harapan dalam proses pembangunan di Indonesia.

Prospek pariwisata ke depan bagi Negara Indonesia sangat menjanjikan bahkan sangat memberikan peluang besar, terutama apabila menyimak angka-angka perkiraan jumlah wisatawan internasional (*inbound tourism*) berdasarkan perkiraan WTO yakni 1,046 milyar orang (tahun 2010) dan 1,602 milyar orang (tahun 2020), diantaranya masing-masing 231 juta dan 438 juta orang berada di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Dan akan mampu menciptakan pendapatan dunia sebesar USD 2 triliun pada tahun 2020. Di samping itu, prospek perkembangan pariwisata ke depan tidak akan bisa

terbendung lagi oleh kemajuan-kemajuan dan perubahan yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan.

Dalam dekade ini perkembangan pariwisata sudah sedemikian pesat dan terjadi suatu fenomena yang sangat global dengan melibatkan jutaan manusia baik kalangan pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Perkembangan dunia pariwisata telah mengalami berbagai perubahan baik perubahan pola, bentuk, maupun sifat perkembangan itu sendiri. Pariwisata merupakan sektor yang bisa menunjang kemajuan suatu daerah, terutama dengan adanya peraturan mengenai otonomi daerah. Kegiatan ini diberlakukan salah satunya atas dasar karena masyarakat daerah memiliki modal yang dapat di andalkan untuk kemajuan daerahnya, salah satunya adalah melalui kegiatan pariwisata. Peranan pariwisata dalam pembangunan secara garis besar berintikan tiga segi yakni segi ekonomis (devisa, pajakpajak), segi kerjasama antar negara (persahabatan antar bangsa), segi kebudayaan (memperkenalkan kebudayaan kita kepada wisatawan mancanegara). Salah satu dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari sektor Pariwisata. Oleh karena itu objek-objek wisata perlu membutuhkan perhatian khusus dari pihak pemerintah dari sisi pengembangannya, selain merupakan kekayaan alam juga sebagai potret daerah yang harus dilestarikan dan dipelihara keberadaannya. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sejak tahun 2006 telah menetapkan Sulawesi Selatan sebagai daerah tujuan wisata unggulan nasional di luar Bali, bersama Sumatra Barat

(Sumbar), Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Utara (Sulut). Sulsel yang selama ini cenderung hanya mengandalkan daerah tujuan wisata budaya Tana Toraja, kini mulai berpaling ke sejumlah kabupaten dan kota sebagai kiat diversifikasi objek wisata yang bisa menarik minat kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik. Kabupaten Enrekang memiliki potensi objek wisata alam, budaya, dan kuliner khas yang tidak kalah dengan daerah lain, sehingga pemerintah Kabupaten Enrekang menjadikan sektor ini sebagai primadona meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah (PAD).

Enrekang masuk dalam kawasan pengembangan pariwisata. Keunggulan sektor pariwisata dalam konteks regional Sulawesi ditunjukkan pula dengan posisi sektor pariwisata di Kabupaten Enrekang. Dari hasil observasi menunjukkan bahwa beberapa wilayah menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan, beberapa wilayah lainnya belum menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan namun merupakan salah satu sumber pendapatan walaupun kontribusinya masih kecil. Tujuan pengembangan pariwisata Kabupaten Enrekang adalah menjadikan pariwisata sebagai bagian dalam mewujudkan dan mengisi pola pembangunan pariwisata nasional, dan salah satu kegiatan ekonomi serta sumber pendapatan daerah. Tujuan pengembangan pariwisata yang telah ditetapkan ini diharapkan dapat memacu perkembangan pariwisata di Kabupaten Enrekang. Pariwisata di Kabupaten Enrekang sudah menjadi salah

satu kegiatan ekonomi daerah, walaupun sebagian besar belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah. Peraturan perundang-undangan dalam pengembangan Pariwisata Kabupaten Enrekang dimana, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pengembangan pariwisata daerah, sehingga sebagai komitmen dan dasar hukum pengembangan pariwisata sehingga arah pengembangan pariwisata terarah dan terukur dan seharusnya tertuang dalam PERDA atau Keputusan Kepala Daerah.

Berdasarkan lingkup pengaturannya, peraturan daerah tentang pariwisata sebagian besar membahas tentang ijin usaha pariwisata dan retribusi. Sementara itu, keputusan Kepala Daerah lebih banyak yang membahas mengenai struktur dan organisasi tata kerja (STOK) Dinas Pariwisata dan ijin usaha pariwisata. Dengan melihat posisi sektor pariwisata tersebut diatas, maka penyusunan RIPPDA Kabupaten Enrekang menjadi penting untuk mendukung dan mewujudkan pengembangan kepariwisataan dan wilayah secara terintegrasi. Lebih lanjut, dukungan dan komitmen yang menerus dari stakeholders kepariwisataan Kabupaten Enrekang juga perlu ditindaklanjuti secara konsisten sebagai bagian dari perbaikan yang terencana dan berkelanjutan. Dari RIPPDA Kabupaten Enrekang, salah satu potensi pariwisata Kabupaten Enrekang yang akan dikembangkan yaitu Permandian Alam Lewaja. Disamping dapat

menikmati kolam renang lewaja, kita dapat juga menikmati keindahan alam lewaja, air terjun dengan air yang jernih dan sejuk. Permandian alam lewaja sangat ramai di kunjungi oleh wisatawan terutama di saat hari libur anak sekolah dan setelah hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, akan tetapi sekarang ini kunjungan wisata berkurang, hal ini disebabkan permandian alam lewaja kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah.

Salah satu misi pembangunan kepariwisataan daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Enrekang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2017-2028 adalah mengembangkan kawasan pembangunan pariwisata dengan mempertimbangkan karakteristik dan keunggulan wilayah kawasan yang bertujuan mengembangkan destinasi wisata daerah yang berdaya saing, memunculkan identitas dan unsur-unsur budaya daerah yang terkait dan meningkatkan apresiasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata daerah.

Pengelolaan terhadap tempat-tempat wisata merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan, dikarenakan dengan pengelolaan akan sangat berpengaruh terhadap wisatawan yang akan datang ketempat tersebut. Di lingkup pemerintahan Kabupaten Enrekang dalam hal ini dinas pemuda, olahraga dan pariwisata kabupaten enrekang yang memiliki tugas sebagai pelaksana urusan pemerintah daerah dibidang kepariwisataan yang membantu kepala

daerah dan memiliki fungsi untuk merumuskan kebijakan bidang pariwisata, kesenian, kebudayaan dan perfilman, penyelenggara pariwisata dan kebudayaan, pembinaan dan pembimbingan pada pelaku pariwisata dan budaya di wilayah kerjanya, koordinator UPTD, hingga pelaporan dan koordinasi urusan pariwisata dan budaya. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut dinas pemuda , olahraga dan pariwisata Kabupaten Enrekang mempunyai hambatan besar terutama terletak pada belum mampu mendesain atau merencanakan secara terpadu program-program pengembangan pariwisata. Bahkan keindahan potensi yang terkandung, nyaris terabaikan karena alasan dana dan kurangnya investor melirik. Akibat dari itu sarana dan prasarana yang seharusnya dapat mendukung pengembangan potensi wisata alam Lewaja belum dapat dimaksimalkan seperti akses jaringan yang belum masuk ke lokasi pemandian wisata alam Lewaja, akses jalan yang rusak dimana lokasi wisata alam Lewaja terletak jauh dari pusat kota Enrekang sehingga jalan kelokasi masih kurang baik hal ini tentu saja sangat membahayakan pengunjung yang akan ke lokasi wisata alam Lewaja.

Selain itu, dan air dikolam renang ketika musim kemarau tiba air kolam renang tersebut sangat jarang dibersihkan sehingga air kolam renang Lewaja menjadi kotor dan tercemar . Hal tersebut berpengaruh terhadap intensitas pengunjung di pemandian wisata alam Lewaja terhitung sejak 3 tahun terakhir pengunjung di wisata alam Lewaja mengalami penurunan. Berdasarkan pada kenyataan

uraian diatas terlihat bahwa pengembangan pariwisata kabupaten Enrekang mendapat tantangan yang kompleks terutama dalam hal pengelolaan terhadap pemerintah daerah yang belum maksimal sehingga pemelitan mencoba mengambil judul **“ANALISIS PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN WISATA PERMANDIAN ALAM LEWAJA DI KABUPATEN ENREKANG”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas maka peneliti mengemukakan rumusan masalah yang akan dijadikan dasar analisis pemerintah dalam pengelolaan objek wisata alam Lewaja Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemerintah daerah kabupaten Enrekang dalam pengelolaan Wisata Permandian Alam Lewaja di Kabupaten Enrekang?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam mengelolah Wisata Permandian Alam Lewaja di Kabupaten Enrekang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemerintah daerah kabupaten Enrekang dalam pengelolaan Wisata Permandian Alam Lewaja di Kabupaten Enrekang.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung pengelolaan Wisata Permandian Alam Lewaja di Kabupaten Enrekang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan, khususnya dalam kajian ilmu pemerintah.

Secara akademis hasil penelitian di harapkan memberikan masukan kepada pemerintah daerah setempat (dinas pariwisata) mengenai Pengembangan Destinasi pengelolaan wisata lewaja kabupaten enrekang, juga menambah sumbangsih pemikiran terkait kajian dan studi yang mengarah kepada pengembangan ilmu secara umum dan ilmu pemerintahan secara khusus, serta dapat menjadi langkah awal peneltian serupa di daerah lain.

2. Secara praktis peneletian ini dapat menjadi acuan untuk mengembangkan suatu ilmu pengetahuan dan hasil penelitian yang diperoleh nantinya dapat menjadi masukan dan evaluasi bagi pemerintah dalam upaya pengelolaan destinasi wisata lewaja kabupaten Enrekang.
3. Secara metodologis penelitian ini diharapkan mampu Lebih mengembangkan pengetahuan menulis dan berpikir bagi penulis,nantinya hasil penelitian tersebut dapat menjadi acuan bagi pemerintah Kabupaten Enrekang dalam mengkaji tentang wisata lewaja.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Konsep Pengelolaan

Kata pengelolaan berasal dari kata kerja mengelola dan merupakan terjemahan dari bahasa Italia yaitu *meneggiare* yaitu yang artinya menangani alat-alat, berasal dari bahasa latin manus yang artinya tangan. Dalam bahasa Prancis terdapat kata *mesnagement* yang kemudian menjadi *management*. Pengelolaan dari kata kelola menurut bahasa adalah Penyelenggaraan (Poerwadarminta,1976:469). Sedangkan menurut Siswanto pengelolaan merupakan suatu aktifitas yang sistematis yang saling bersusunan agar tercapai tujuan (Siswanto, 2005 : 21).

Pengelolaan dapat diartikan sebagai manajemen, manajemen adalah sebagai suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya-upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian tersebut dalam skala aktifitas juga dapat diartikan sebagai aktifitas menerbitkan, mengatur, dan berpikir yang dilakukan oleh seseorang, sehingga mampu mengemukakan, menata, dan merapikan segala sesuatu yang ada disekitarnya, mengetahui prinsip-prinsipnya serta menjadi hidup selaras dan serasi dengan yang lainnya

Andrew. F. Siula (1985), pengelolaan umumnya dikaitkan dengan aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan

berbagai sumber daya yang dimiliki oleh organisasi sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (2010) pengelolaan di definisikan sebagai berikut:

- a. Proses, cara dan perbuatan.
- b. Proses melakukan perbuatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.
- c. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi.
- d. Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Menurut (Terry, 2009) pengelolaan (*management*) merupakan sebuah proses khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran

(Suprpto, 2009), juga mendefinisikan manajemen sebagai seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengontrolan atas human and national resources (terutama human resources) untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan lebih dahulu.

Pengelolaan merupakan suatu proses kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

- a. Perencanaan (*planning*), adalah suatupemeliharaan yang berhubungan dengan waktu yang akan dating dalam

menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan demi mencapai hasil yang dikehendaki.

- b. Pengorganisasian (organisasi), adalah penentuan, pengelompokan dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan.
- c. Pelaksanaan (actuating), adalah usaha agar setiap anggota kelompok mengusahakan pencapaian tujuan dengan berpedoman pada perencanaan dan usaha pengorganisasian.

Pengawasan (controlling), adalah proses penentuan apa yang seharusnya diselesaikan yaitu penilaian pelaksanaan bila perlu melakukan tindakan korektif agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan rencana

Berdasarkan peraturan pemerintahan nomor 67 tahun 1996, pengelolaan dan pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam meliputi 5 hal yaitu :

1. Pembangunan sarana dan prasarana pelengkap beserta fasilitas pelayanan lain bagi wisatawan.
2. Pengelolaan objek dan daya tarik wisata alam termasuk sarana dan prasarana yang ada.
3. Penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat dan sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam yang bersangkutan.
4. Penyelenggaraan persetujuan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah terhadap objek wisata dan daya tarik wisata alam yang bersangkutan.

5. Penyelenggaraan persetujuan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah terhadap objek dan daya tarik wisata alam yang bersangkutan.

## 2.2 Konsep Implementasi

Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Wahab dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan.

Implementasi merupakan terjemahan dari kata *Implementation* berasal dari kata kerja *to implement*. Dalam *Webster's Dictionary* (1979:914), *to implement* berasal dari bahasa latin, *Implementum* dari asal kata *impere* dan *plere*. Kata *implere* dimaksudkan *to fill up; to fill in*, yang artinya mengisi penuh; melengkapi, sedangkan *plere* maksudnya *to fill*, yaitu mengisi. Selanjutnya, kata *to implement* dimaksudkan sebagai (1) *to carry into effect; to fulfill; accomplish*, membawa suatu hasil (akibat); melengkapi dan menyelesaikan; (2) *to provide with the means for carrying out into effect or fulfilling; to give practical effect to*, menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu; memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu; (3) *to provide or equip with implements*, menyediakan atau melengkapi dengan alat.

Apapun produk kebijakan itu, pada akhirnya bermuara pada tataran bagaimana mengimplementasikan kebijakan tersebut bisa teraktualisasi. Untuk lebih mengenal substansi dari implementasi kebijakan (*policy implementation*), maka berikut ini dideskripsikan beberapa model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh para pakar dan pemerhati kebijakan publik, yaitu:

1. Model George Edwards III

Edwards III (1980) mengemukakan: "*In our approach to the study of policy implementation, we begin in the abstract and ask: What are the preconditions for successful policy implementation? What are the primary obstacles to successful policy implementation?*" Untuk menjawab pertanyaan penting itu, maka Edwards III (1980) menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yakni: "*Communication, resources, dispositions or attitudes, and bureaucratic structure*".

Dalam proses implementasi kebijakan, komunikasi memegang peranan penting karena pelaksana harus mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Perintah untuk melaksanakan kebijakan harus diteruskan kepada implementor secara tepat, dan konsisten. Kurangnya sumber daya akan berakibat ketidak-efektifan penerapan kebijakan. Disposisi atau kecenderungan sikap pelaksana diartikan sebagai keinginan dan kesepakatan di kalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan. Jika penerapan kebijakan akan dilaksanakan secara efektif, maka implementor bukan hanya mengetahui apa yang harus mereka

kerjakan dan memiliki kemampuan untuk menerapkannya, tetapi para implementor juga harus mempunyai keinginan untuk menerapkan kebijakan tersebut. Akhirnya struktur birokrasi mempunyai dampak atas penerapan dalam arti bahwa penerapan itu tidak akan berhasil jika terdapat kekurangan dalam struktur birokrasi tersebut.

a. *Communication* (Komunikasi)

Edwards III (1980:10) menegaskan :*For Implementation to be effective, those whose responsibility it is to implement a decision must know what they are supposed to do. Orders to implement policies must be transmitted to the appropriate personnel, and they must be clear, accurate, and consistent. If the policies decision-makers wish to see implemented are not clearly specified, they may be misunderstood by those at whom they are directed. Obviously, confusion by implementers about what to do increases the chances that they will not implement a policy as those who passed or ordered it intended.*

Implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, jika yang bertanggungjawab dalam proses implementasi kebijakan tersebut mengetahui apa yang harus dilakukannya. Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten kepada orang-orang yang benar-benar mampu melaksanakannya. Jika pesan dan perintah kebijakan yang diberikan oleh pembuat kebijakan tidak jelas dan tidak terspesifikasikan, maka kemungkinan besar akan terjadi kesalahpahaman di tingkat implementor kebijakan yang ditunjuk. Jelas sekali akan terjadi kebingungan di tingkat

implementor, khususnya dalam memahami dekripsi tugas yang harus dilakukannya. Kondisi ini akan memberi peluang kepada mereka untuk tidak mengimplementasikan kebijakan tersebut sebagaimana dikehendaki oleh para pemberi mandat atau pembuat kebijakan.

b. *Resourches* (Sumber Daya)

Sehubungan dengan faktor *Resourches* (Sumber Daya), Edwards III (1980:10) menjelaskan :*Important resourches include staff of the proper size and with the necessary expertise; relevant and adequate information on how to implement policies and on the compliance of others involved in implementation; the authority to ensure tha policies are carried out as they are intended; and facilities (including buildings, equipment, land, and supplies) in which or with which to provide services. Insufficient resourches will mean that laws will not be enforced, services will not be provided, and reasonable regulations will not be developed.*

Sumber daya yang penting meliputi staf yang tepat dengan keahlian yang dibutuhkan; informasi yang cukup dan relevan tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan terjadi penyesuaian terhadap siapa saja yang terlibat di dalam implementasi kebijakan; kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu; dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah dan persediaan) di dalamnya untuk kepentingan pelayanan publik.

c. *Dispositions or attitudes* (Sikap Pelaksana)

Edwards III (1980:11) menjelaskan : *The dispositions or attitudes of implementations is the third critical factor in our approach to the study of public policy implementation. If implementation is to proceed effectively, not only must implementers know what to do and have the capability to do it, but they must also desire to carry out a policy. Most implemntors can exercise considerable discretion in the implementation io policies. One of the reasons for this is their independence from their nominal superiors who formulate the policies. Another reason is the complecity of the policies themselves. The way in which implementers exercise their dicretion, however, depends in large part upon their dispositions toward the policies. Their attitudes, in turn, will be influenced by their views toward the policies per se and by how they see the policies effecting their organizational anf personal interests.*

Sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam proses implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, maka para implementor kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya, tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan dan kecenderungan sikap positif untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kebanyakan para implementor menggunakan sedapat mungkin otoritas dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Salah satu alasan mengenai hal ini disebabkan independensi mereka terhadap eksistensi dari pembuat kebijakan. Alasan yang lain adalah kompleksitas masalah dari kebijakan itu sendiri. Meskipun cara lain para implementor

menggunakan otoritasnya tergantung dari kecenderungan sikap mereka yang mengacu kepada kebijakan-kebijakan tersebut, namun pada akhirnya sikap merekalah yang akan mempengaruhi cara pandang mereka terhadap kebijakan tersebut dan bagaimana mereka melihat kebijakan akan berdampak terhadap kepentingan perorangan dan organisasi mereka.

d. *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi)

Edwards III (1980:11) menjelaskan: *Even If sufficient resources to implement a policy exist and implementers know what to do and want to do it, implementation may still be thwarted because of deficiencies in bureaucratic structure. Organizational fragmentation may hinder the coordination necessary to implement successfully a complex policy requiring the cooperation of many people, and it may also waste scarce resources, inhibit change, create confusion, lead to policies working at cross-purposes, and result in important functions being overlooked.*

Meskipun sumber daya dalam rangka untuk mengimplementasikan kebijakan telah mencukupi dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan serta bersedia untuk melaksanakannya, tapi terkadang proses implementasi kebijakan masih terhambat oleh in-efisiensi struktur birokrasi. Fragmentasi organisasi dapat menghambat koordinasi yang diperlukan guna keberhasilan proses implementasi sebuah kebijakan. Disisi lain bahwa dalam implementasi kebijakan membutuhkan kerjasama yang melibatkan banyak orang. Hal ini menyebabkan terbuangnya sumber daya yang langka, menutup kesempatan, menciptakan kebingungan,

menggiring kebijakan-kebijakan untuk menghasilkan tujuan silang, dan mengakibatkan fungsi-fungsi penting menjadi terlupakan.

## 2. Model Warwic

Warwic mengatakan bahwa: "Dalam Implementasi kebijakan terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Kemampuan Organisasi,
- b. Informasi,
- c. Dukungan, dan
- d. pembangian potensi

Keempat faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kemampuan organisasi; dalam tahap ini, implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai kemampuan melaksanakan tugas-tugas yang seharusnya, seperti yang telah dibebankan atau ditetapkan pada suatu organisasi. Kemampuan organisasi terdiri dari tiga unsur pokok yaitu: (i) kemampuan tehnis, (ii) kemampuan dalam menjalin hubungan dengan organisasi lain yang beroperasi dalam bidang yang sama dalam arti perlu koordinasi antar instansi yang terkait, dan (iii) meningkatkan sistem pelayanan dengan mengembangkan "SOPs" (*Standard Operating Prosedures*), yaitu pedoman tata aliran kerja dalam pelaksanaan kebijakan.

- b. Informasi; kurangnya informasi dari para aktor terhadap objek kebijakan atau struktur komunikasi yang kurang antara organisasi pelaksana dengan objek kebijakan.
- c. Dukungan; kurang kesediaan objek-objek kebijakan "terikat" kegiatan/kewajiban tertentu dan kepatuhan mereka makin sedikit bilamana isi kebijakan bertentangan dengan pendapat atau keputusan mereka.
- d. Pembagian potensi, pembagian wewenang dan tanggungjawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas seperti pembatasan-pembatasan yang kurang jelas serta adanya desentralisasi pelaksanaan.

### 3. Model Van Meter dan Van Horn

Model pertama adalah model yang paling klasik yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975). Model ini menegaskan bahwa: "Implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik". Beberapa variabel yang mempengaruhi proses kebijakan publik adalah:

- 1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antarorganisasi,
- 2. Karakteristik dari agen pelaksana atau implementor,
- 3. Kondisi ekonomi, sosial dan politik;
- 4. Kecenderungan (*disposition*) dari pelaksana/ impiementor.

Keempat variabel akan dijelaskan alasannya sebagai berikut :

- a. Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi.
- b. Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, seperti dinyatakan oleh van Meter dan van Horn (1975), maka pembahasan ini tidak bisa lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan.
- c. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.
- d. Arah kecenderungan-kecenderungan pelaksana terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan juga merupakan suatu hal yang

sangat penting. Para pelaksana mungkin gagal dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan dengan tepat karena mereka menolak tujuan-tujuan yang terkandung dalam kebijakan-kebijakan tersebut. Dan begitupun sebaliknya.

#### 4. Model Hoogwood & Gun

Model kedua adalah Model yang diketengahkan oleh Brian W. Hoogwood & Lewis A. Gun (1978), yang menegaskan bahwa: untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat yaitu:

- a. Berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar,
- b. Apakah untuk melaksanakannya tersedia cukup waktu dan sumberdaya yang memadai,
- c. Apakah perpaduan sumber daya yang diperlukan benarbenar ada,
- d. Apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh hubungan kausal yang andal,
- e. Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi, dengan asumsinya, bahwa semakin sedikit hubungan "sebab-akibat", semakin tinggi pula hasil yang dikehendaki oleh kebijakan tersebut dapat dicapai,
- f. Apakah hubungan saling ketergantungan kecil,

- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan,
  - 8) bahwa tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar,
- h. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna, dan
- i. Bahwa pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

## **2.3 Pemerintah Daerah (Dinas Pariwisata)**

### **2.3.1 Pemerintah Daerah**

Pemerintahan Daerah di dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut:

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah adalah :

- a) Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

- b) Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- c) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah, sangat erat kaitannya dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu negara, yakni desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Hal tersebut dijelaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 8, 9 dan 11 sebagai berikut:

- 1) Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
- 2) Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

- 3) Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

### **2.3.2 Dinas Pariwisata**

- a. Dinas Pariwisata Kabupaten Enrekang adalah salah satu unit kerja yang merupakan perangkat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang yang menyelenggarakan dan melaksanakan tugas-tugas di bidang kepariwisataan daerah di Kabupaten Enrekang berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah “Dinas Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah”.
- c. Dinas Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi. Pada Dinas Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

- d. Tugas dan fungsi utama dinas daerah yang memberi pelayanan kepada masyarakat tanpa batas-batas tertentu dapat digunakan sebagai organisasi ekonomi yang memberikan pelayanan jasa dan menghasilkan imbalan (Riwu, 1997).
- e. Dinas Pariwisata sebagai salah satu dinas di Kabupaten Enrekang adalah organisasi pariwisata daerah yang bertugas dalam menjalankan roda pembangunan di sektor pariwisata

## **2.4 Objek Wisata**

Obyek wisata adalah segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke tempattersebut. Menurut SK. MENPARPOSTEL No.: KM. 98 / PW.102 / MPPT-87,obyek wisata adalah semua tempat atau keadaan alam yang memiliki sumberdaya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan.

### **1. Pengertian Pariwisata**

Secara etimologis pariwisata berasal dari bahasa sangsekerta yang terdiri dari dua kata yaitu “pari” dan “wisata”. Pari berarti berulang-ulang,berkali-kali atau berputar-putar, sedangkan wisata berarti perjalanan atau bepergian, jadi pariwisata berarti perjalanan yang dilakukan secara berputar putar, berulang-ulang atau berkali-kali(Yoeti, 2001).Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang

diselenggarakan dari suatu tempat lain dengan maksud bukan untuk berusaha (business) atau mencari nafkah ditempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya dan rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Undang undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Pariwisata adalah suatu kegiatan kemanusiaan berupa hubunganantar orang, baik dari Negara yang sama atau hanya dari daerah geografis yang terbatas. Di dalamnya termasuk tinggal untuk sementara waktu didaerah lain atau Negaral lain atau benua lain untuk memenuhi berbagai kebutuhan kecuali kegiatan untuk memperoleh penghasilan (Warpani P,2007).

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan di dukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerinta daerah (Antariksa, 2016). Setiap orang yang berpergian dari tempat tinggalnya untuk berkunjung ke tempat lain dengan menikmati perjalanan dan kunjungan itu disebut Traveller, sedangkan orang yang bepergian melintasi suatu negara dengan tidak singgah walaupun perjalanan itu sendiri melebihi jangka waktu 24 jam disebut Tourist (R.S Damardjati, 2001). Sedangkan menurut (Muljadi,2009) pariwisata adalah keseluruhan hubungan dan gejala-gejala yang timbul dari adanya orang asing dan perjalannya itu tidak untuk

bertempat tinggal menetap dan tidak ada hubungan dengan kegiatan mencari nafkah.

Pariwisata ialah aktivitas perjalanan yang dilakukan sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan bukan untuk menetap atau mencari nafkah melainkan hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau libur dan tujuan-tujuan lain (Koen Meyers, 2009). Sedangkan pengertian pariwisata menurut UU Nomor 10 tahun 2009 adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah (Bab 1, Pasal 1, Ayat 3).

Beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas dapat diambil suatu pengertian pariwisata yaitu suatu kegiatan yang melibatkan orang-orang yang melakukan perjalanan dengan tujuan untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu dalam kurun waktu tertentu dan bukan mencari nafkah. Suatu perjalanan dianggap sebagai perjalanan wisata jika memenuhi 3 persyaratan yang diperlukan, yaitu:

- a. Harus bersifat sementara.
- b. Harus bersifat sukarela (Voluntary) dalam artian tidak ada paksaan.
- c. Tidak bekerja yang menghasilkan upah atau bayaran (Suwarjoko, dkk, 2007).

## **2. Pengertian Kepariwisataan**

Kepariwisataan adalah fenomena politik-sosial-ekonomi-budaya fisik yang muncul sebagai wujud kebutuhan manusia dan negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat tuan rumah, sesama wisatawan, pemerintah dan pengusaha berbagai jenis barang dan jasa yang diperlukan oleh wisatawan (Warpani P, 2007). Kepariwisataan merupakan hal-hal yang berhubungan dengan pariwisata yang muncul sebagai kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah Daerah dan pengusaha.

Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, menyebutkan bahwa kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat.

## **3. Jenis-Jenis Pariwisata**

Berikut ini adalah jenis-jenis pariwisata sebagai berikut:

### **a. Wisata Argo**

Ragam pariwisata baru yang dikaitkan dengan industry pertanian, misalnya wisata durian pada saat musim durian, atau wisata tani, yakni para wisatawan turun terjun aktif menanam padi dan memandikan kerbau di sungai.

b. Wisata belanja

Dilakukan karena kekhasan barang yang ditawarkan atau bagian dari jenis pariwisata lain, misalnya Bandung dengan pusat jins di Jl. Cihampelas, Sidoarjo dengan pusat Tas di Tanggulangin.

c. Wisata budaya

Berkaitan dengan ritual budaya yang sudah menjadi tradisional misalnya mudik Lebaran setahun sekali atau ada peristiwa budaya yang digelar pada saat-saat tertentu, misalnya: Sekaten di Surakarta dan Yogyakarta, Ngaben di Bali, Labuhan di Cilacap, pemakaman jenazah di Tanah Toraja.

d. Wisata iklim

Bagi Negara beriklim empat, pada saat tertentu benar-benar dilakukan untuk perjalanan mengunjungi tempat-tempat lain hanya untuk berburu panas sinar matahari. Begitupun dengan masyarakat tropis seperti Indonesia, penduduk kota pantai berwisata ke pegunungan dan sebaliknya.

e. Wisata karya

Jenis pariwisata yang para wisatawannya berkunjung dengan maksud dinas atau tugas-tugas lain misalnya, peninjauan/inspeksi daerah, sigi lapangan.

f. Wisata kesehatan

Berhubungan dengan maksud penyembuhan suatu penyakit.

g. Wisata konvensi atau seminar

Dilakukan dengan sengaja memilih salah satu DTW sebagai tempat penyelenggaraan seminar di kaitkan dengan upaya pengembangan DTW yang bersangkutan.

h. Wisata niaga

Berkaitan dengan kegiatan pemiagaan (usaha perdagangan). Wisatawan datang karena ada urusan pemiagaan di tempat tersebut, misalnya mata niaga atau tempat perundingan niaga ada disana.

i. Wisata olahraga

Yakni mengunjungi peristiwa penting didunia olahraga, misalnya pertandingan pertunjukan kejuaraan, pecan olahraga nasional , asean games, olimpiade atau sekedar pertandingan persahabatan.

j. Wisata pelancongan/pesiar/pelasir/rekreasi

Dilakukan untuk berlibur, mencari suasana baru, menikmati keindahan alam, melepaskan ketegangan (lepas dari kesibukan kerja rutin).

k. Wisata petualang

Dilakukan lebih ke arah olahraga yang sifatnya menantang kekuatan fisik dan mental para wisatawan.

l. Wisaata ziarah

Dalam ikatan dengan agama dan budaya mengunjungi tempat ibadah atau tempat ziarah pada waktu tertentu, misalnya: waisak di kompleks candi Borobudur-Magelang, menyepi di pantai Parangkusumo – Yogyakarta, mengunjungi tempat yang dianggap

keramat, ziarah ke makam tokoh-tokoh masyarakat atau pahlawan bangsa.

m. Darmawisata

Perjalanan beramai-ramai untuk bersenang-senang, atau berkaitan dengan pelaksanaan darma di luar ruangan atau melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di luar waktu kerja sehari-hari.

n. Widiawisata (pendidikan)

Perjalanan ke luar daerah atau kampung dalam rangka kunjungan studi, dilakukan untuk mempelajari seni budaya rakyat, mengunjungi dan meneliti cagar alam dan atau budaya atau untuk kepentingan ilmu selama waktu tertentu misalnya tugas belajar.

#### **4. Industri Pariwisata**

Industri Pariwisata adalah gambaran suatu industri adalah suatu bangunan pabrik yang mempunyai cerobong dan menggunakan mesin mesin tetapi Industri pariwisata merupakan suatu industri yang terdiri dari dari serangkaian perusahaan yang menghasilkan jasa atau produk yang berbeda satu dengan yang lain. Produk Industri Pariwisata adalah semua jasa yang diberikan oleh macam-macam perusahaan, semenjak seorang wisatawan meninggalkan tempat kediamannya, sampai di tempat tujuan, hingga ketempat asalnya. Sedangkan produk wisata merupakan rangkaian dari berbagai jasa yang saling terkait, yaitu jasa yang dihasilkan

dari berbagai perusahaan (segi ekonomis), jasa masyarakat (segi sosial) dan jasa alam (Suwanto, 2007).

Sejak calon wisatawan memilih-milih destinasi yang akan dikunjungi dan merencanakan meninjau objek dan melakukan berbagai kegiatan di daerah tujuan, mulailah industri informasi memasuki lahan kepariwisataan. Selanjutnya, sepanjang perjalanan dari rumah sampai di destinasi dan kembali ke rumah, berbagai macam produk industri menjadi bagian pariwisata. Pengangkutan, perhotelan, perbankan, rumah makan pertokoan, produk seni-budaya, komunikasi, pakaian dan lain-lain (Warpani. P, 2007).

Tujuh klasifikasi sektor utama dalam industri pariwisata yaitu :

1. Sektor Pemasaran (*The Marketing Sector*)

Mencangkup semua unit pemasaran dalam industri pariwisata, misalnya kantor biro perjalanan dengan jaringan cabangnya, kantor pemasaran maskapai penerbangan (air lines), kantor promosi daerah tujuan wisata tertentu, dan sebagainya.

2. Sektor Perhubungan (*The Carrier Sector*)

Mencangkup semua bentuk dan macam transportasi publik, khususnya yang beroperasi sepanjang jalur transit yang menghubungkan tempat asal wisatawan (traveller generating region) dengan tempat tujuan wisatawan (*tourist destination region*).

3. Sektor Akomodasi (*The Accommodation Sector*)

Sebagai penyedia tempat tinggal sementara (penginapan) dan pelayanan yang berhubungan dengan hal itu, seperti penyediaan makanan dan minuman (*food and beverage*).

4. Sektor Daya Tari/atraksi Wisata (*The Attraction Sector*)

Sektor ini berfokus pada penyediaan daya tarik atau atraksi wisata bagi wisatawan. Lokasi utamanya berada pada daerah tujuan wisatawan di daerah transit. Misalnya taman budaya, hiburan, even olahraga, dan peninggalan budaya.

5. Sektor Tour Operator (*The Tour Operator Sector*)

Mencangkup perusahaan penyelenggara dan penyedia paketwisata. Perusahaan ini membuat dan mendesain paket perjalanan dengan memilih dua atau lebih komponen (baik tempat, paket, atraksi wisata).

6. Sektor Pendukung/rupa-rupa (*The Miscellaneous Sector*)

Sektor ini mencangkup pendukung terselenggaranya kegiatan wisata baik di negara/tempat asal wisatawan, sepanjang rute transit, maupun di negara/tempat tujuan wisata. Misalnya toko oleh-oleh (*Souvenir*).

7. Sektor Pengkoordinasi/regulator (*The Coordinating sector*)

Mencangkup peran pemerintah selaku regulator dan asosiasi di bidang pariwisata selaku penyelenggara pariwisata, baik ditingkat lokal, regional, maupun internasional. Sektor ini biasanya

menangani perencanaan dan fungsi manajerial untuk membuat sistem koordinasi antara seluruh sektor dalam industry pariwisata.

## **5. Tujuan Pariwisata**

Menentukan tujuan adalah langkah awal dari perencanaan agar ketikakegiatan dilaksanakan bisa sesuai dengan apa yang diinginkan. Seseorang dalam melakukan perjalanan pasti memiliki tujuan yang diinginkan. Menurut (Kesrul 2003) tujuan pariwisata, yaitu sebagai berikut:

1. Keinginan bersantai, bersuka ria, rileks (lepas dari rutinitas)
2. Keinginan mencari suasana baru atau suasana lain
3. Memenuhi rasa ingin tahu untuk menambah wawasan
4. Keinginan berpetualang dan mencari pengalaman baru
5. Mencari kepuasan dari yang sudah didapatkan
6. Dari pendapat tersebut dapat di simpulkan bahwa tujuan pariwisata adalah untuk bersantai, mencari suasana baru, memenuhi rasa ingin tahu, ingin berpetualang dan mencari kepuasan ketika berwisata.

## **2.5 Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Enrekang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2017-2028**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang di maksud dengan;

1. Daerah adalah kabupaten Enrekang
2. Pemerintah daerah adalah pemerintah kabupaten enrekang
3. Bupati adalah Bupati Enrekang
4. Perangkat daerah adalah unsurr pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintah di bidang tertentu di Daerah.
5. Dinas kepumadaan,Olahraga dan Pariwisata adalah perangkat daerah yang memyelenggarakan urusan di bidang kepariwisataan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup RIPPDA meliputi;

- a. Pembngunan Destinasi pariwisata melputi;
- b. Pembngunan industri pariwisata daerah;
- c. Pembangunan pemsaran dan promosi pariwisata daerah dan
- d. Pembangunan kelembagaan kepariwisataan

## BAB III

### PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

#### Bagian kesatu

##### Umum

### Pasal 3

[1]. RIPPARDA memuat;

- A. Visi;
- B. Misi;
- C. Tujuan;
- D. Sasaran; dan
- E. Arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah tahun 2017-2028, yang selanjutnya dalam peraturan Bupati kabupaten Enrekang

[2]. Visi pembangunan kepariwisataan daerah adalah terwujudnya kabupaten Enrekang sebagai Daerah pariwisata berbasis Agropolutian, budaya dan berwawasan lingkungan tahun 2028.

[3]. Misi pembangunan kepariwisataan Daerah adalah sebagai berikut;

- a. mengembangkan kawasan pembangunan pariwisata dengan mempertimbangkan karakteristik dan keunggulan wilayah kawasan;
- b. mengembangkan penguatan sinergi lembaga kepariwisataan dan lembaga pendukung kepariwisataan.
- c. mengembangkan sumber daya manusia pariwisata pada seluruh stakeholders terkait.
- d. mengembangkan sistem informasi dan pemasaran pariwisata berbasis tourism. Trade and investment [TTI]; dan

- e. mengembangkan dan melestarikan sejarah, budaya dan nilai tradisi.

[4]. Tujuan pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi;

- a. mengembangkan destinasi Daerah yang berdaya asing.
- b. memunculkan identitas dan unsur-unsur budaya Daerah yang terkait;
- c. meningkatkan apresiasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata daerah;
- d. meningkatkan keterlibatan komunitas local dalam penyediaan prasarana dan sarana pariwisata;
- e. meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas koordinasi antara SKPD pelaksana dan sektor-sektor pariwisata;
- f. meningkatkan arus perjalanan wisata dari dalam e Daerah
- g. meningkatkan penyediaan data dan informasi bagi wisatawan serta pemasaran dan promosi pariwisata Indonesia ke segmen pasar wisatawan yang tepat dan terarah;
- h. mewujudkan iklim investasi yang harmonis dan menguntungkan bagi masyarakat Daerah ; dan
- i. mempertimbangkan daya dukung lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya alam dan budaya untuk pariwisata dalam rangka menciptakan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

[5]. Sasaran pembangunan kepariwisataan Daerah , meliputi

- a. teridentifikasi sumber daya alam, seni, budaya, dan tradisi sebagai ciri khas dan keunikan kabupaten Enrekang yang memiliki nilai tinggi secara regional, nasional, dan internasional serta mengembangkan dan mengelolanya secara berkelanjutan;
- b. terbentuknya skala pengembangan pariwisata yang jelas baik bagi perencanaan, pengembang, maupun pengelola pariwisata;
- c. terbukanya peluang keterlibatan masyarakat [investasi dan lapangan pekerjaan] Daerah dalam kegiatan pariwisata yang meningkatkan kualitas kehidupannya;
- d. terjalinnya kerjasama kelembagaan yang baik antara sektor-sektor pemerintahan, swasta, dan masyarakat;
- e. terbentuknya kawasan pembangunan pariwisata dan kawasan wisata unggulan yang berfungsi dalam meningkatkan kualitas kepariwisataan Daerah;
- f. tercapainya pariwisata Daerah yang berkualitas tinggi dan menjadi destinasi utama wisata alam, budaya dan minat khusus;
- g. meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, lama tinggal dan pengeluaran wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara di Daerah;
- h. terciptanya koordinasi yang seimbang antara sektor publik dan swasta yang terkait, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan akademisi dalam pembangunan pariwisata;
- i. terjaganya kelestarian sumber daya alam dan budaya yang menjadi daya tarik pembangunan pariwisata Daerah.

- j. terwujudnya basis data dan informasi akurat ,selalu terbaru. Dan dapat di akses oleh stakeholder pariwisata;
- k. terjadinya fasilitas, sarana ,dan prasarana pariwisata unggul yang memenuhi standar terkait,yang meningkatkan kenyamanan,keamanan, dan pengetahuan wisatawan akan alam dan budaya Daerah;
- l. meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat yang dapat diandalkan untuk pembangunan pariwisata Daerah;
- m. meningkatnya kualitas pemasaran dan promosi sehingga terarah dan tepat sasaran;
- n. terciptanya apresiasi wisatawan terhadap alam dan budaya Daerah;
- o. terwujudnya lembaga kepariwisataan dan sistim tata kelola yang mampu menyinergikan pembangunan industry pariwisata ,kawasan pariwisata,dan pemasaran pariwisata secara professional ,efektif,dan efisien dan
- p. terwujudnya pariwisata sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan Daerah.

[6].pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana di maksud pada ayat [1] diselenggarakan secara terpadu oleh [pemerintah Daerah dan masyarakat.

[7].RIPPARDA sebagaimana di maksud pada ayat [1] dilakukan evaluasi paling sedikit 1 [lima] tahun.

## 2.4 Kerangka Fikir

Pengembangan kegiatan pariwisata diperlukan pengaturan-pengaturan alokasi ruang yang dapat menjamin *sustainable development* guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan kepariwisataan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya alam buatan secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan dan keamanan, oleh karena itu dibutuhkan strategi-strategi khusus dari pemerintah kita untuk mengelola kepariwisataan nasional. Karena dengan itu cara pengelola dapat lebih mudah dilaksanakan oleh pemerintah atau masyarakat luas.

Penataan ruang pada dasarnya merupakan sebuah pendekatan dalam mengembangkan wilayah yang bertujuan untuk mendukung komisi, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan serta ditunjang dengan beberapa saranaprasarana demi mendapatkan tujuan yang diinginkan oleh masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan daerah-daerah pariwisata yang berada di daerah kabupaten Enrekang. Penataan ruang untuk menunjang kepariwisataan tidak hanya memberikan arahan lokasi investasi, tetapi juga harus memberikan arahan jaminan terpeliharanya ruang/daerah pengembangan pariwisata yang berkualitas dan mempertahankan keberadaan objek-objek pariwisata.

Keterbatasan dukungan sarana dan prasarana penunjang merupakan juga salah satu yang perlu diperhatikan. Dimana dukungan sarana dan prasarana merupakan faktor penting untuk keberlanjutan penyelenggaraan kegiatan pariwisata, seperti penyediaan akses,

akomodasi, sarana prasarana pendukung lainnya. Masih banyak kawasan wisata yang sangat berpotensi, tetapi masih belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Selain didukung oleh penataan ruang sarana-sarana yang menunjang dalam kegiatan pengelolaan pariwisata juga didukung oleh beberapa sumber-sumber, yakni sumber daya manusia, sumber keuangan dan sumber materi atau fisik. Ketiga sumber itu sangat berkaitan satu sama lainnya. Oleh karena itu ketiganya harus benar-benar bisa terpenuhi, karena pengelolaannya sangat berpengaruh besar bagi kepariwisataan. Pelaksanaan pengelolaan nasional yang meliputi seluruh aspek kehidupan yang kompleks, tentunya sangat diperlukan adanya organisasi yang mantap dan tangguh, sehingga dengan demikian diharapkan sarana atau tujuan dapat tercapai secara optimal. Pemerintah kabupaten Enrekang melalui dinas pemuda dan olahraga dan pariwisata diharapkan mampu berperan dalam menunjang program pengelolaan pariwisata.

Sesuai dengan fungsinya tersebut, dinas kebudayaan dan pariwisata, Kabupaten Enrekang menyusun program kerja yang dirasa relevan dengan keadaan kepariwisataan di Kabupaten Enrekang. Untuk menghindari terjadinya kesalahan teknis dilapangan selama melakukan penelitian, maka penelitian ini harus memiliki arah yang menjadi focus dari penelitian. Berdasarkan uraian diatas maka model kerangka pikir model penelitian ini dapat dilihat pada bagan kerangka pikir berikut ini:

## Bagan Kerangka Pikir

